

KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI SUKU JAWA DI SURINAME PADA MASA KOLONIAL BELANDA (1890-1975)

Anwar Firdaus Mutawally^{1*}, Wawan Darmawan²

¹Universitas Padjadjaran

²Universitas Pendidikan Indonesia

Corresponding Author's e-mail : anwarfirdausmutawally@gmail.com^{1*}

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 8 August 2023

Page: 803-814

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i8.741>

Article History:

Received: July, 20 2023

Revised: August, 01 2023

Accepted: August, 03 2023

Abstract : *This study aims to determine the socio-economic life of the Javanese in Suriname during the Dutch Colonial period. The method used is the historical method with research techniques of library research and documentation studies. The results showed that the Javanese arrived in Suriname as contract workers for plantations, mines or factories. The sending of contract labor from Java lasted from 1890 to 1939 with three periods. The life of the Javanese people in Suriname is very apprehensive and far from worth living. The life of the Javanese people got better when the poenale sanctie was abolished in the 1930s. Since then, the work carried out by contract workers has increasingly varied, from farmers, breeders to artists. During the time of the Indonesian National Revolution, a movement emerged to return to Indonesia and was successfully implemented with the njowo movement in 1954. Since Suriname became an autonomous region, the Javanese have changed from being looked down upon to being the most prominent in Suriname. Since independence in 1975, there have been Javanese tribes who have survived in Suriname and some of them have migrated to the Netherlands.*

Keywords : *Colonialism, Javanese People, Netherlands, Socio-Economy, Suriname.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan sosial-ekonomi Suku Jawa di Suriname pada masa Kolonial Belanda. Metode yang digunakan ialah metode sejarah dengan teknik penelitian studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Jawa tiba di Suriname sebagai pekerja kontrak untuk perkebunan, pertambangan, atau pabrik. Pengiriman tenaga kontrak dari Jawa berlangsung dari tahun 1890 hingga tahun 1939 dengan tiga periode. Kehidupan masyarakat Jawa di Suriname sangat memprihatikan dan jauh dari kata layak tinggal. Kehidupan Suku Jawa semakin membaik dengan dihapuskannya *poenale sanctie* pada tahun 1930-an, sejak saat tersebut pekerjaan yang digeluti pekerja kontrak semakin beragam mulai petani, peternak, hingga seniman. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, muncul gerakan untuk pulang ke Indonesia dan berhasil dilaksanakan dengan gerakan *mulih njowo* pada tahun 1954. Sejak Suriname menjadi wilayah otonom, suku Jawa berubah dari suku yang diremehkan menjadi yang terkemuka di Suriname. Sejak kemerdekaan tahun 1975, terdapat suku Jawa yang

bertahan di Suriname dan sebagiannya bermigrasi ke Belanda.

Kata Kunci : Belanda, Kolonialisme, Sosial-Ekonomi, Suku Jawa, Suriname.

PENDAHULUAN

Suriname merupakan negara yang terletak di Benua Amerika Selatan. Negara ini memiliki wilayah seluas 163.265 km² dengan kekayaan alam melimpah terutama pada sektor pertambangan dan pertanian. Dari segi geografis, sebagian besar wilayah Suriname masih berupa hutan. Berdasarkan data tahun 2019, 90% wilayah Suriname terdiri dari hutan belantara, sungai-sungai besar dengan flora dan fauna yang beranekaragam. Karena kondisi demikian, sebagian besar penduduknya terkonsentrasi pada kota-kota besar misalnya Paramaribo (Grantham *et al.*, 2020). Secara demografis, Suriname terdiri dari etnis pribumi dan pendatang. Etnis pribumi terdiri dari suku Kreol, Amerindian, dan Maroon. Sedangkan etnis pendatang terdiri dari suku bangsa Eropa, India, Jawa, dan Tionghoa (Hoeft & Meel, 2022). Suku Jawa menjadi hal unik yang dimiliki Suriname dibandingkan negara lainnya di Amerika Selatan. Suku yang berasal dari Indonesia ini memiliki populasi besar di Suriname, tidak banyak ditemukan di negara-negara Amerika Selatan lainnya, dan mampu melestarikan kebudayaan dengan baik.

Secara historis, Belanda memulai kolonisasi di Suriname pada tahun 1667 dan berakhir dengan kemerdekaan Suriname pada tanggal 25 November 1975 (Domingo, 1995). Keberadaan suku Jawa di Suriname merupakan dampak dari kolonialisme Belanda. Pada abad ke-19, pemerintah Kolonial Belanda hendak mengembangkan budidaya tanaman kopi, tebu, dan tembakau di Koloni Suriname. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pekerja kebun, pemerintah Belanda melakukan berbagai kebijakan seperti membeli budak Afrika hingga memperkerjakan tenaga kontrak orang Tionghoa dan India. Namun kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Karena itu, sasaran selanjutnya pemerintah kolonial ialah mendatangkan orang-orang Jawa yang sudah familiar dengan kondisi iklim dan tanah tropis Suriname (Susanti, 2016).

Pemerintah Belanda kemudian mulai mengirim tenaga kerja Jawa pada tahun 1890. Pengiriman orang Jawa ke Suriname berlangsung selama 49 tahun (1890-1939). Suku Jawa mulanya dikenal sebagai etnis yang berada pada lapisan bawah stratifikasi sosial masyarakat Suriname. Seiring perkembangan zaman, Suku Jawa Suriname berubah menjadi salah satu etnis yang paling berpengaruh di Suriname. Hal tersebut tentu menjadi perhatian mengenai seperti apa dinamika sosial ekonomi masyarakat Suku Jawa Suriname pada masa kolonial Belanda. Berdasarkan permasalahan tersebut tersebut, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “Kehidupan Sosial-Ekonomi Suku Jawa di Suriname Pada Masa Kolonialisme Belanda (1890-1975)”. Tujuan penelitian ini ialah untuk menjelaskan perkembangan kehidupan sosial-ekonomi suku Jawa di Suriname pada masa kolonial Belanda. Tahun 1890 dipilih sebagai tahun awal penelitian dengan dimulainya pengiriman migran Jawa ke Suriname. Sedangkan tahun 1975 dipilih sebagai tahun akhir penelitian dengan kemerdekaan Suriname dari Kerajaan Belanda.

Penelitian terdahulu mengenai etnis Jawa di Suriname telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian pertama dilakukan oleh Susanti pada tahun 2016 dengan judul “Nasionalisme dan Gerakan Milih Njowo, 1947 dan 1954”. Pada penelitian ini dijelaskan mengenai gerakan Milih Njowo yang memulai gelombang kepulangan migran Jawa Suriname ke Indonesia pada tahun 1947 dan 1954. Sedangkan penelitian kedua dilakukan oleh Acep Rahmat, Nana Supriatna, dan Mohammad Eryk Kamsori yang berjudul “Dari Imigrasi Menuju Integrasi: Peranan Etnis Jawa Dalam Politik Di Suriname (1991- 2015)” pada tahun 2018. Isi penelitiannya menjelaskan mengenai perjuangan orang-orang suku Jawa dalam perpolitikan Suriname. Kebaruan yang hendak ditonjolkan pada penelitian ini ialah mengenai perkembangan sosial-ekonomi suku Jawa di Suriname pada masa kolonial Belanda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi (Sjamsuddin, 2012). Tahap pertama yang

dilakukan adalah heuristik, pada tahap ini dilakukan pencarian sumber-sumber yang relevan dengan penelitian. Pengumpulan sumber dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari laporan sensus penduduk Suriname, dan surat kabar yang diperoleh melalui lembaga kearsipan. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan sumber lainnya yang sesuai dengan tema penelitian. Tahap selanjutnya ialah kritik, pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh. Pada tahap selanjutnya yakni interpretasi, penulis menganalisis fakta-fakta yang telah disaring untuk mendapatkan hubungan peristiwa yang utuh. Tahap terakhir ialah historiografi, pada tahap ini penulis melakukan penulisan sejarah dalam bentuk artikel jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kedatangan Suku Jawa ke Suriname

Sebelum menjadi koloni Belanda, mulanya Suriname merupakan wilayah koloni Inggris hingga tahun 1667. Upaya kolonisasi Inggris pertama kali dimulai pada tahun 1630, angkatan perang Inggris di bawah pimpinan Kapten Marshall melakukan survei tanah disekitar kawasan *Surinen* yakni pemukiman suku Arawak yang sekarang menjadi negara Suriname. Setelah survei selesai dilakukan, Marshall kemudian mencoba mendirikan perkebunan di wilayah Surinen. Meskipun demikian, upaya tersebut gagal karena kurangnya tenaga manusia untuk dipekerjakan di perkebunan. Upaya kolonisasi oleh Inggris akhirnya berhasil pada tahun 1650, di bawah pimpinan Lord Willoughby Inggris berhasil mendirikan pemukiman bernama Willoughbyland. Pada masa awal berdiri, Willoughbyland memiliki luas 120 km² dengan penduduk terdiri dari ribuan orang Amerindian, 3.000 orang Afrika dan 1.000 orang kulit putih (Wolbers, 1970).

Pada tanggal 26 Februari 1667, Willoughbyland diserang tujuh kapal Belanda dan jatuh setelah digempur selama 34 jam. Pada tanggal 31 Juli 1667, Inggris dan Belanda menandatangani Perjanjian Breda yang isinya pertukaran Koloni Nieuw Amsterdam (sekarang New York, Amerika Serikat) milik Belanda dengan Willoughbyland milik Inggris. Kesepakatan ini kemudian diresmikan dalam perjanjian Westminster pada tahun 1674 (Shomette dan Haslach, 2002). Sejak Willoughbyland diambil alih oleh pemerintah Belanda, wilayah Willoughbyland kemudian berganti nama menjadi Suriname dan dikelola oleh *Sociëteit van Suriname* yakni anak perusahaan dari *Geoctroyeerde Westindische Compagnie* (Perusahaan Hindia Barat Belanda) (Boxer, 1973).

Pada masa awal kolonisasi Belanda, mulanya pemerintah kolonial menggunakan budak dari suku Amerindian untuk mengolah lahan pertanian di Suriname. Meskipun demikian, karena kondisi kerja yang terlalu keras dan penyakit yang dibawa oleh orang-orang Eropa, banyak budak suku Amerindian yang meninggal dunia. Karena hal tersebut, pemerintah kolonial kemudian membeli ribuan budak kulit hitam dari Afrika sebagai gantinya. Namun sama halnya dengan budak Amerindian, para budak Afrika tak mampu bertahan dengan kondisi kerja yang keras. Akibatnya banyak budak yang melarikan diri ke pedalaman hutan, menikah dengan penduduk Pribumi (Amerindian), dan membentuk komunitas baru bernama Maroon (Stedman, 1962).

Sebagai bentuk pembalasan terhadap kekejaman para pemilik kebun, para Maroon sering menyerang perkebunan milik orang-orang Eropa untuk menjarah bahan pokok, membebaskan budak kulit hitam, dan mengajak para budak pada gerakan "Maroonage" yakni upaya memerdekakan diri dengan mengasingkan diri ke tempat terpencil. Kehadiran komunitas Maroon membawa kemerosotan pada perekonomian para pemilik kebun. Ini terjadi karena sekitar 250 budak Afrika melarikan diri setiap tahunnya dari perkebunan untuk menjadi Maroon. Karena itu para pemilik kebun meminta pemerintah kolonial untuk menangkap orang-orang Maroon guna dihukum. Akibatnya terjadi pertempuran gerilya antara pasukan kolonial dengan orang-orang Maroon yang berlangsung selama ratusan tahun.

Upaya budak kulit hitam untuk memperoleh kemerdekaannya semakin terwujud dengan ditandatanganinya perjanjian damai (*vredesverdrag*) pada tahun 1760. Pada perjanjian damai tersebut, Maroon dari Suku Ndyuka diakui kemerdekaannya oleh pemerintah kolonial (Knol, 2012). Meskipun demikian, pemerintah kolonial masih memburu Maroon dari suku-suku

lainnya. Aktivitas perbudakan di Suriname sempat terhenti dengan jatuhnya Suriname ke tangan Inggris pada tahun 1806 sampai 1816. Pada masa pendudukan tersebut, Inggris menerapkan Undang-Undang Abolition of the Slave Trade Act (1807) yang isinya menghentikan perdagangan budak Afrika Trans-Atlantik ke Suriname. Selain itu Inggris juga memaksa Belanda untuk menghentikan perbudakan di wilayah koloninya dengan ditandatangani perjanjian Inggris-Belanda pada tahun 1818 (van Galen & Hassankhan, 2018). Meskipun demikian, perbudakan di Suriname masih terus berlanjut karena para pemilik kebun menolak menghapus perbudakan. Praktik perbudakan masih berlanjut secara terselubung hingga tahun 1863. Pada saat tersebut, budak tak hanya berasal dari Afrika saja melainkan juga orang Tionghoa (Emmer, 1990).

Pada tahun 1863, pemerintah Belanda secara resmi menghapuskan perbudakan dengan disahkannya Undang-Undang Emansipasi. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, para budak di Suriname berubah statusnya menjadi warga bebas dan dapat mencari penghidupannya masing-masing. Meskipun demikian, para pemilik kebun mulai khawatir dengan nasib perkebunan mereka. Ini disebabkan karena mereka belum memiliki pengganti yang cocok menggantikan para budak. Untuk mengakali permasalahan tersebut, para pemilik kebun menaruh kontrak kerja pada mantan budak untuk bekerja di perkebunan hingga tahun 1872. Sembari menunggu kehadiran pengganti budak, para pemilik perkebunan menekan pemerintah Belanda untuk memikirkan kebijakan tenaga kerja baru. Pemerintah Belanda kemudian mengesahkan peraturan baru untuk merekrut tenaga kerja kontrak guna menggantikan para budak. Urusan perekrutan tenaga kerja kontrak kemudian diserahkan pada *Nederlandsche Handel-Maatschappij* (NHM) (Allen, 2001).

NHM kemudian merekrut pekerja kontrak asal Hindustan (India) untuk dipekerjakan di perkebunan. Keberadaan para pekerja India terbukti efektif menggantikan para budak yang telah bebas. Namun para pekerja kontrak asal India membawa beberapa permasalahan masuk ke Suriname. Para pekerja India dilindungi oleh undang-undang Kerajaan Inggris, dengan demikian pemerintah Belanda tidak dapat sewenang-wenang memperlakukan tenaga kontrak asal India. Akibatnya para pekerja kerap melakukan tindak kriminal di Suriname yang membuat pemerintah kolonial kewalahan. Selain itu, gerakan kemerdekaan India juga menjadi penghambat pengiriman pekerja kontrak. Puncaknya terjadi pada tahun 1916, dimana Mahatma Gandhi beserta pengikutnya melakukan protes masal yang menyebabkan Inggris menghentikan pengiriman pekerja kontrak ke Suriname (Hoefte & Meel, 2022; Meel, 2011).

Disela kesulitan yang dihadapi pemerintah Belanda dalam mencari tenaga kerja di Suriname. Pemerintah Belanda mulai melirik potensi yang dimiliki Masyarakat Suku Jawa di Hindia Belanda. Pulau Jawa pada Abad ke-19 memiliki penduduk yang padat, rakyatnya hidup dalam kemiskinan, masyarakatnya mahir bercocok tanam, dan kondisi alam yang mirip dengan Suriname. Menimbang potensi-potensi tersebut, pemerintah Belanda meresmikan Keputusan Kerajaan Belanda No.27 pada tanggal 22 Maret 1872. Isi keputusan ini secara resmi mengatur perjanjian kontrak tenaga kerja Jawa selama lima tahun, setelah kontrak habis para pekerja diizinkan pulang ke tanah air kecuali bagi mereka yang memperoleh premi tertentu. Para pekerja direncanakan untuk bekerja di perkebunan (tebu, kakao, dan kopi), atau pertambangan (bauksit) (Susanti, 2016).

Meskipun demikian, perekrutan tenaga kontrak dari Jawa tidak dapat dilakukan dengan segera. Hal ini karena banyak anggota parlemen Kerajaan mengeluhkan biaya besar untuk mengirim tenaga kerja Jawa ke Suriname. Selain itu, kebanyakan dari mereka juga menduga orang-orang Jawa akan kurang kooperatif jika mereka mengetahui dirinya akan dikirim ke tempat yang sangat jauh. Permasalahan ini dapat diatasi dengan upaya promosi pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan meyakinkan bahwa Suriname bukan tempat yang jauh dari Jawa. Cara ini terbukti berhasil karena beberapa orang Jawa menyangka Suriname lokasinya tidak jauh dari Hindia Belanda. Mereka kemudian menerima kontrak dan bersedia berangkat ke Suriname (Hoefte & Meel, 2022).

Uji coba tenaga kontrak Jawa dilakukan pada tahun 1890. Pada tanggal 9 Agustus 1890, kurang lebih 100 tenaga kerja yang dibawa NHM tiba di Paramaribo. Mereka kemudian dipekerjakan pada perkebunan di Mariënberg. Walaupun mendapatkan tenaga kerja yang cukup banyak, para pemilik kebun mengaku tidak senang dengan kehadiran para pekerja Jawa. Hal ini

karena para pekerja Jawa diketahui gemar “madat” dan pikirannya lamban (Hoefte, 1990). Meskipun demikian, bagi pemerintah Belanda kehadiran para pekerja asal Jawa merupakan upaya yang berhasil dan efektif mengisi kekosongan tenaga kerja di koloni Suriname. Oleh sebab itu, pemerintah kolonial semakin gencar dalam melakukan perekrutan tenaga kontrak di Jawa .

Pemerintah Belanda kemudian mempekerjakan *werk* atau calo untuk membantu mereka merekrut tenaga kerja dari Jawa. Upaya para *werk* dilakukan dengan cara yang beragam mulai memasang poster untuk menarik perhatian para tenaga kerja, menghembuskan isu-isu ekonomi, mengajak orang-orang Jawa untuk bekerja ke Suriname, hingga melakukan cara kotor. Berdasarkan keterangan beberapa pegawai kontrak Suriname, diketahui para *werk* melakukan penipuan, bahkan penculikan untuk memperoleh tenaga kerja. Penculikan umumnya dilakukan dengan cara membohongi korban bahwa yang bersangkutan kedatangan anggota keluarga, korban lalu dibius, kemudian diangkut ke kapal menuju Suriname. Alasan yang menyebabkan para *werk* begitu semangat dalam merekrut tenaga kerja karena mereka mendapat upah sebesar 80 sen per hari, lebih besar dibandingkan upah minimal di Jawa pada saat tersebut yang hanya 33 sen. Selain itu jika mereka menyelesaikan kontraknya selama lima tahun, para *werk* juga akan mendapatkan uang sebesar 100 sen, seekor kerbau, dan alat-alat pertanian (Susanti, 2016).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang suku Jawa rela menjadi migran ke Suriname. Faktor tersebut antara lain memperbaiki perekonomian, melarikan diri dari hutang yang menumpuk, kabur dari perjodohan paksa, hingga tertarik dengan iming-iming yang diberikan *werk* yakni pulang menjadi orang kaya. Sedangkan sebagian yang pergi ke Suriname dengan terpaksa beralasan mereka baru sadar diculik, disantet oleh *werk*, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa secara umum faktor kemiskinan menjadi penyebab utama orang-orang Jawa pergi merantau ke Suriname (Susanti, 2016).

Menurut Ismael (1949), pengiriman tenaga kerja Jawa ke Suriname terbagi menjadi tiga pembabakan yakni sebagai berikut:

1. Awal (Sebelum Tahun 1895): Tenaga kerja Jawa pada masa ini ditugaskan murni untuk dipekerjakan pada perkebunan dan penambangan.
2. Pertengahan (Tahun 1895-1930): Tenaga kerja Jawa pada masa ini masih digunakan sebagai pekerja perkebunan dan penambangan, namun pemerintah Belanda mulai menggunakan mereka sebagai penduduk koloni guna mengeksploitasi lebih banyak tanah di Suriname.
3. Akhir (Setelah Tahun 1930): Sebagian besar tenaga kerja Jawa digunakan untuk kebutuhan penduduk koloni. Meskipun terdapat juga sebagian kecil yang murni dipekerjakan untuk perkebunan dan penambangan.

Kehidupan Migran Jawa Suriname di Koloni Suriname (1890-1954)

Pengiriman migran Jawa ke Suriname berlangsung selama 49 tahun yakni dari tahun 1890 sampai 1939 dengan jumlah keseluruhan pekerja sebanyak 32.956 orang. Jumlah pekerja kontrak lebih rinci tertera pada **Tabel 1** di bawah ini. Mayoritas pekerja Jawa di Suriname merupakan suku Jawa dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun demikian, terdapat pula sebagian kecil pekerja yang berasal dari suku Sunda dan suku Madura. Gobardhan-Rambocus dan Hassankhan (1993) menyatakan bahwa pengaruh orang-orang non-Jawa tidak begitu besar sehingga mereka lambat laun mereka terasimilasi menjadi suku Jawa. Mayoritas migran Jawa beragama Islam, berbeda dengan mayoritas penduduk Suriname beragama Kristen yang juga agama resmi di wilayah koloni. Karena itu, suku Jawa menjadi kelompok minoritas dan tidak memperoleh hak-hak sebagaimana dimiliki suku bangsa lainnya di Suriname.

Tabel 1. Data Migran Jawa Suriname Pada Tahun 1890-1939

Tahun	Pria	Wanita	Anak-anak	Total
1890-1900	1.434	668	89	2.191
1900-1910	5.027	2.312	198	7.537
1910-1920	3.613	2.317	67	5.997
1920-1930	8.342	6.449	475	15.266
1930-1939	6.721	664	631	8.016
Total	19.088	12.408	1.460	32.956

Sumber: Ismael (1949)

Para migran bekerja sebagai pegawai kontrak di perusahaan-perusahaan milik orang Belanda. Pekerjaan yang umum dilakukan antara lain menjadi buruh tani perkebunan (tebu, kopi, dan karet), penambang bauksit di Moengo, atau menjadi pegawai pabrik. Setiap pekerja terikat perjanjian kontrak selama lima tahun di bawah aturan *Poenale Sanctie*. Dalam aturan kerja disebutkan bahwa mereka harus bekerja selama tujuh jam sehari bagi pekerja kebun atau penambangan, atau sepuluh jam sehari bagi buruh pabrik selama lima tahun. Para pekerja laki-laki memperoleh upah sebesar 40 sen per hari, sedangkan pekerja perempuan memperoleh 30 sen sehari. Setelah masa kontrak lima tahun habis, para pekerja diizinkan pulang ke Jawa dengan prasyarat tertentu. Bagi mereka yang masih ingin bekerja di Koloni Suriname harus mengisi kontrak selama satu tahun tambahan. Setelah menyelesaikan kontrak terakhir, mereka yang menetap di Suriname akan memperoleh uang sebesar 100 Gulden, peralatan pertanian, dan tanah seluas dua hektar untuk biaya hidup (Ehrenburg & Meyer, 2015; Susanti, 2016).

Meskipun demikian, pilihan pulang ke Jawa bukan hal yang mudah karena pada kenyataannya prosedur untuk pulang jauh lebih sulit dibandingkan menetap di Suriname. Pemerintah Belanda tidak memberikan secara gratis biaya pulang pekerja, melainkan menetapkan biaya pulang sebesar 100 Gulden (Ehrenburg & Meyer, 2015). Karena itu kebanyakan pekerja enggan pulang kembali ke tanah air karena biaya yang mahal. Menurut Hoefte (1990), hanya 20 sampai 25 persen atau 8.400 orang migran Jawa yang pulang ke Hindia Belanda sebelum pecahnya perang dunia kedua. Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang mendorong migran tidak pulang ke tanah air yakni perasaan malu karena gagal jadi orang kaya, menemukan jodoh di Suriname, melihat prospek penghidupan yang lebih menjanjikan di Suriname, faktor kesehatan, dan lain sebagainya. Bagi sebagian migran Jawa di Suriname, mereka menyebut perasaan mereka sebagai *ndungke jangkar* atau “menurunkan jangkar” yang artinya mereka telah berlabuh dan telah mengikat hatinya di Suriname (Susanti, 2016).

Kehidupan para migran Jawa di Suriname sangat memprihatinkan. Para pegawai hanya mendapatkan upah rendah, makanan seadanya, dan perawatan medis di bawah standar. Selain itu *poenalie sanctie* juga menjadi sumber ketakutan bagi para pekerja. Hal ini karena dengan adanya aturan *poenalie sanctie*, para pekerja dapat dihukum oleh pemilik perusahaan tanpa melalui pengadilan. Walaupun aturan *poenalie sanctie* awalnya ditujukan pemerintah Belanda untuk mendisiplinkan pegawai kontrak, namun para pemilik perusahaan menggunakan aturan ini secara sewenang-wenang untuk kepentingan pribadi (Hoefte & Meel, 2022; Ismael, 1949). Anton de Kom memberikan keterangan mengenai kekejaman para pemilik perusahaan dalam menghukum para pekerja Jawa, para mandor sering menghukum pekerjaannya karena hal-hal sepele seperti beristirahat sejenak karena kelelahan, atau tak sengaja merusak tanaman. Akibatnya para pekerja dihukum dengan penambahan jam kerja hingga dihukum secara fisik oleh para *opseter* (pengawas) (de Kom, 2022).

Sebelum mendirikan desa sendiri, para migran Jawa di generasi awal hidup pada perkampungan yang dekat dengan lokasi kerja. Berdasarkan kesepakatan kontrak, para pemilik perusahaan diwajibkan untuk menyediakan tempat tinggal gratis yang layak bagi para pegawainya. Namun pada kenyataannya rumah yang diberikan kondisinya sangat buruk. Berdasarkan laporan van Vleuten pada tahun 1909, kondisi tinggal pekerja Jawa sangat kumuh, padat penduduk, dan kondisinya memprihatinkan (Hoefte, 1990). Karena kondisi perekonomian yang buruk, banyak migran yang bergantung pada kegiatan kriminal untuk menambah penghasilan. Diantara kegiatan kriminal tersebut antara lain perjudian, jual beli candu, hingga

prostitusi. Perjudian ilegal dilakukan para migran dengan harapan dapat segera kaya dan cepat pulang ke Jawa, sedangkan candu digunakan untuk menghilangkan rasa sakit akibat hukuman *poenalie sanctie* atau sekedar rekreasi. Sedangkan prostitusi dilakukan para migran wanita untuk menambah penghasilan. Kegiatan prostitusi dilakukan baik dengan sesama migran Jawa maupun etnis lainnya. Namun praktik-praktik buruk ini hilang dengan hadirnya regulasi yang lebih ketat dan masuknya generasi migran selanjutnya ke Suriname (Towikromo, 1997).

Pada akhir tahun 1910-an, Suriname mengalami krisis ekonomi karena Perang Dunia I. Akibatnya banyak perusahaan yang gulung tikar dan banyak pegawai kontrak yang menjadi pengangguran. Selain itu keadaan juga diperparah dengan depresi ekonomi pada awal tahun 1930. Oleh sebab itu, pemerintah Belanda mengubah kebijakan terhadap para migran Jawa dengan mempekerjakan para migran untuk menanam padi di pelosok Suriname, dan menghapus *poenalie sanctie* pada tahun 1931. Pemerintah Belanda mulai mengelompokkan para migran Jawa ke berbagai desa otonom yang dipimpin oleh kepala desa dan penghulu yang mengurus urusan keagamaan. Berkat peraturan tersebut, para migran semakin tersebar pada desa-desa di pesisir Suriname. Bahkan terdapat satu desa di Distrik Commewijne yang hampir seluruh penduduknya suku Jawa yakni Desa Tamanredjo (Schinagl, 2009).

Setelah tahun 1930, pekerjaan yang ditekuni para migran Jawa lebih beragam. Selain bekerja sebagai pekerja kontrak, para pekerja kontrak juga menekuni profesi lain disela mengerjakan pekerjaan utamanya seperti bertani (padi, singkong, dan sebagainya), memelihara unggas dan hewan ternak lainnya, hingga ada juga yang menjadi seniman. Hiburan yang populer di kalangan orang Jawa Suriname berupa wayang, ludruk, dan ande lumut. Wayang yang sering dimainkan biasanya berupa *wayang wong* (wayang orang), atau wayang kulit. Cerita yang digunakan sama seperti pewayangan di Indonesia, yang berpusat pada kisah Mahabharata atau Ramayana (Gobardhan-Rambocus & Hassankhan, 1993). Pewayangan sering ditampilkan pada hari-hari besar misalnya hari ulang tahun ratu Belanda. Selain itu para migran juga mengadakan beberapa acara keagamaan seperti *selametan* atau *muludan* (maulid nabi) (Schinagl, 2009).

Kehidupan keagamaan migran Jawa sangat kompleks dan secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama ialah kiblat barat (*madep ngulon*), kelompok ini meyakini bahwa kiblat yang tepat menghadap barat sebagaimana yang dilakukan penduduk Jawa. Kelompok ini berisi orang-orang *abangan* yang masih kental dengan tradisi keagamaan di Jawa seperti *selametan* sampai membuat sesajen. Sedangkan kelompok kedua ialah kiblat timur (*madep ngetan*). Kelompok ini menyadari bahwa Suriname bukan bagian Hindia Belanda dan kiblat yang benar seharusnya menghadap timur langsung ke Mekkah. Kelompok ini diisi oleh santri dan orang-orang yang terpengaruh reformasi Islam, karena itu mereka menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam (Hendrix & van Waning, 2010). Perpecahan ini terjadi pada tahun 1933, dimana orang-orang dari kelompok kiblat timur mendirikan mendirikan Masjid bernama Nabawi di Paramaribo yang kiblatnya mengarah ke timur. Akibat dari perpecahan ini, masing-masing kelompok mendirikan masjidnya masing-masing dan selalu berseberangan dalam urusan beragama (Towikromo, 1997).

Sebelum tahun 1940, kebanyakan pernikahan migran Jawa tidak diakui secara resmi oleh pemerintah kolonial. Ini karena berdasarkan aturan yang berlaku di Suriname, pernikahan hanya diakui jika melalui tata cara Kristen. Namun bagi kebanyakan migran Jawa yang beragama Islam, peraturan ini sangat memberatkan dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Oleh sebab itu, kebanyakan migran hanya melakukan pernikahan siri pada para penghulu. Pernikahan tersebut tidak dicatat secara hukum dan berdampak pada pembagian waris. Permasalahan ini berubah dengan kehadiran kebijakan baru oleh Gubernur Johannes Kielstra yang mengakui legalitas pernikahan Islam di Suriname pada tahun 1940 (Schinagl, 2009).

Dari segi pendidikan, Para migran Jawa sangat jauh tertinggal dibandingkan etnis-etnis lainnya di Suriname seperti Kreol atau India. Berdasarkan laporan tahun 1940 diketahui bahwa 60% sampai 75% anak Suku Jawa tidak memahami sama sekali bahasa Belanda, selain itu 50% diantaranya bahkan buta huruf (Meel, 2011). Para ahli berbeda pendapat mengenai faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan masyarakat Jawa di Suriname. Ismael (1949) mengemukakan bahwa rendahnya pendidikan migran disebabkan oleh kebijakan pemerintah

kolonial, sedangkan Hendrix dan Waning lebih menyoroti kondisi keagamaan masyarakatnya sendiri. Menurut Ismael, pemerintah Belanda memberikan upah yang rendah, waktu kerja yang keras, dan *poenalie sanctie* bagi para pekerja Jawa. Karena itu para pekerja tidak dapat menyekolahkan putra-putrinya ke sekolah. Keadaan ini berbanding terbalik dibandingkan para pekerja India yang dapat leluasa menyekolahkan putra-putrinya karena mendapat intervensi Inggris. Berbeda dengan pendapat Ismael, Hendrix dan van Waning (2010) mengemukakan bahwa rendahnya tingkat pendidikan justru disebabkan akibat umat Islam Jawa di Suriname. Kelompok kiblat barat yang *abangan* cenderung mengesampingkan pendidikan dan lebih mementingkan upacara-upacara tradisional untuk meningkatkan kohesi sosial. Menurut mereka kohesi sosial antar sesama Jawa jauh lebih penting dibandingkan memperoleh pendidikan yang belum tentu memiliki dampak bagi sesama. Berbeda halnya dengan kelompok kiblat timur yang mewakili santri dan reformis. Mereka meyakini bahwa menaiki jenjang sosial dilakukan dengan mempelajari ilmu umum dan agama. Karena itu banyak dari mereka yang menyumbangkan uangnya untuk masjid dan menyekolahkan putra putrinya ke sekolah.

Perang Dunia Kedua berdampak besar bagi kemerdekaan Koloni Suriname dan berbagai etnis didalamnya. Jatuhnya Belanda ke tangan Jerman pada tahun 1940 menghentikan total pengiriman migran Jawa ke Suriname. Nasib buruk kembali menimpa Belanda dengan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang dua tahun kemudian. Dalam keadaan genting, Ratu Wilhelmina melakukan pidato pada tanggal 6 Desember 1942 yang isinya menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan menjadikan seluruh koloninya sebagai bagian persemakmuran Kerajaan Belanda (de Belder et al., 1982). Melihat kesempatan besar untuk merdeka, beberapa Etnis di Suriname mendirikan partai-partai untuk memperjuangkan kesejahteraannya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya. Kabar ini tersebar luas ke seluruh penjuru tanah air bahkan tiba hingga ke Suriname. Para migran Jawa merasakan perasaan bahagia dan mulai melakukan kontak dengan negara asal bahkan ada juga yang hendak pulang ke Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah Belanda mengingkari janjinya dengan mencoba menduduki kembali Indonesia. Selain itu, terdapat juga wacana baru untuk melanjutkan pengiriman migran Jawa ke Suriname. Hal ini menyebabkan para migran menjadi geram dan memunculkan semangat nasionalisme.

Pada tahun 1947 telah didirikan dua organisasi yaitu KTPI (Kaum Tani Persatuan Indonesia) yang dipimpin oleh Iding Soemita dan PBIS (Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname), yang dipimpin oleh Soediono Soeriwisastro. Kedua organisasi ini kemudian menjadi partai politik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sukunya. Gerakan pulang ke tanah air semakin besar setelah terjadi demonstrasi yang dilakukan 782 orang Jawa pada tahun 1947 dan berkat hal tersebut mereka dapat pulang ke Indonesia. Bahkan orang-orang Jawa Suriname menyumbang harta bendanya untuk membeli pakaian dan obat-obatan guna kepentingan rakyat Indonesia. Namun kedua kelompok tersebut memiliki paham yang berbeda, KTPI lebih berorientasi pada kesejahteraan suku Jawa di Suriname, sedangkan PBIS berorientasi pada pulang ke tanah air (Susanti, 2016). Pada pemilihan tahun 1949, PBIS kalah suara melawan KTPI dan para pengikutnya mulai merencanakan upaya pulang ke Indonesia.

Pada tahun 1950, pemerintah Belanda menjadikan Suriname sebagai wilayah otonom. Ketika itu pemerintah Belanda mulai melakukan upaya untuk mempertahankan orang Jawa di Suriname. Cara yang dilakukan ialah dengan menjadikan para migran Jawa menjadi warga negara Belanda hanya dengan membubuhkan cap jempol pada formulir. Meskipun demikian, 75% migran Jawa menolak kewarganegaraan Belanda dan ingin menjadi warga negara Indonesia. Karena takut kehilangan tenaga kerja murah, banyak orang-orang Jawa yang dipaksa menjadi warga negara Belanda. Sebagian kecil migran yang terafiliasi partai PBIS melakukan gerakan pulang ke Indonesia bernama *mulih ndjowo* (pulang ke Jawa) pada 1954. Meskipun bernama *Mulih Njowo* pada kenyataannya para migran Jawa ditempatkan di Sumatra Barat. Pada tanggal 3 Februari 1954, para migran yang dipimpin oleh Salikin Hardjo tiba di Teluk Bayur, Padang (Susanti, 2016).

Kehidupan Suku Jawa Menjelang Kemerdekaan Suriname (1954-1975)

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 1964 dan 1971 sebagaimana yang tertera pada **Tabel 2.**, Suriname memiliki jumlah penduduk sebanyak 324.211 dan 384.900 orang. Etnis terbesar di Suriname pada saat tersebut ialah Kreol dan India, sedangkan Suku Jawa menduduki urutan ketiga di Suriname. Hubungan orang-orang Jawa dengan etnis lainnya hampir selalu berlangsung dengan baik, orang-orang Jawa dikenal ramah dan mudah bergaul dengan etnis lainnya. Orang Jawa di Suriname mengutamakan sikap yang disebut *rukun*. Rukun memiliki arti menghindari konflik sebisa mungkin. Sebagai contoh jika dalam satu lingkungan kerja terjadi perseteruan dengan pekerja lainnya, maka orang Jawa cenderung mengalah dan menghindari perseteruan (Hendrix & van Waning, 2010). Namun sikap rukun ini menjadi kelemahan besar yang menyebabkan kebanyakan orang-orang Jawa tersisihkan dalam struktur masyarakat. Karena sikap lemah tersebut, Pemerintah Belanda bersikap diskriminatif dengan menggunakan orang-orang Kreol atau India dalam pemerintahan, perdagangan, dan lain sebagainya (Rahmat et al., 2018). Selain itu, orang Jawa saat tersebut sering jadi bahan cemoohan dan stereotip etnis-etnis lainnya misalnya suku Kreol yang memanggil mereka dengan sebutan *lau-lau yam-paneisi* (orang-orang bodoh) karena tingkat pendidikan yang rendah dan lemah.

Tabel 2. Sensus Penduduk Suriname Pada Tahun 1964 dan 1971

Etnis	Tahun			
	1964		1971	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Kreol	114.961	35.5	118.500	30.79
India	112.633	34.7	142.300	36.97
Jawa	48.463	14.9	58.900	15.3
Tionghoa	5.339	1.6	6.400	1.66
Pribumi	4.322	1.3	10.200	2.65
Amerika				
Eropa	7.287	2.3	4.000	1.04
Maroon	27.698	8.5	39.500	10.26
Tidak diketahui	3.508	1.1	5.100	1.33
Total	324.211	100	384.900	100

Sumber: Derde Algemene Volkstelling (1964) & Vierde Algemene Volkstelling (1971)

Keadaan hidup masyarakat Jawa berubah pasca Suriname menjadi bagian Kerajaan Belanda pada tahun 1954, banyak masyarakat Suku Jawa yang meninggalkan pedesaan dengan melakukan urbanisasi ke kota besar misalnya Paramaribo. Para orang tua mengirimkan putra-putrinya dari desa untuk sekolah di kota besar, atau para pemuda yang merantau ke kota dengan kualifikasi seadanya. Meskipun begitu, tingkat urbanisasi Suku Jawa di Suriname lebih rendah dibandingkan etnis lainnya misalnya Kreol. Hal ini disebabkan karena orang-orang Jawa memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat di pedesaan, tingkat pendidikan yang rendah, dan perasaan cukup masyarakat Jawa terhadap fasilitas yang dimiliki desa. Kendati demikian, berkat urbanisasi ini kehidupan orang-orang Jawa jadi lebih baik. Mereka mendapatkan penghasilan, tingkat pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya. Di perkotaan besar, orang-orang Jawa bekerja pada bidang yang beradani mulai perdagangan (warung-warung kecil atau toko kelontong), perkantoran, hingga akhirnya menduduki jabatan pemerintahan.

Keberadaan orang-orang Jawa di perkotaan sangat tersebar dan sering berbaur dengan etnis lainnya. Karena itu orang-orang Jawa terbagi menjadi dua golongan yakni golongan tradisional yang masih menjunjung tinggi kebudayaan Jawa, dan golongan modern yang mulai meninggalkan banyak unsur kebudayaan Jawa. Golongan modern umumnya berasal dari generasi muda Jawa Suriname. Golongan ini kebanyakan mulai meninggalkan pakaian dan bahasa Jawa dan berpakaian ala Barat. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan ialah Sranantongo atau Belanda yang lebih umum digunakan etnis lainnya di Suriname. Selain itu

golongan modern juga mulai meninggalkan tradisi-tradisi yang mereka anggap kuno seperti *slametan* maupun *muludan* (Meel, 2011).

Selain mengalami perubahan sosial, keberadaan para suku Jawa di perkotaan membuka lebih banyak pemikiran masuk termasuk pemikiran tentang emansipasi. Emansipasi bertujuan guna meningkatkan taraf kehidupan, membebaskan dari belenggu kemiskinan, dan menyetarakan kedudukan suku Jawa dengan etnis lainnya di Suriname (Schinagl, 2009). Dengan adanya pemikiran ini, masyarakat Jawa merubah pandangannya dari pulang ke Indonesia (seperti yang dilakukan partai PBIS) menjadi mencari kesejahteraan di Suriname. Antara tahun 1949 sampai 1963, partai KTPI di bawah kepemimpinan Iding Soemita gencar melakukan koalisi dengan partai dari etnis mayoritas guna memperbaiki kondisi kehidupan orang-orang Jawa di Suriname. Berkat upaya KTPI banyak suku Jawa yang terbantu dari segi ekonomi dengan distribusi pekerjaan, surat izin, tanah, beasiswa, dan tempat tinggal. Keberhasilan Iding Soemita dalam meningkatkan kesejahteraan menyebabkan banyak masyarakat Jawa yang bergabung dengan KTPI. Namun kegagalan Iding dalam memperoleh kursi parlemen pada tahun 1967, menyebabkan banyak pengikutnya keluar dari KTPI dan mendirikan partai baru bernama SRI (Sarekat Rakyat Indonesia) pada tahun 1969. SRI didirikan oleh golongan modern yang didominasi para pemuda Jawa (Meel, 2011). Walaupun tidak memiliki banyak suara, tetapi partai-partai Jawa dikenal sebagai mediator apabila terjadi perseteruan antara partai Kreol dan partai India.

Selain mendirikan organisasi-organisasi politik, orang-orang Jawa juga mendirikan dan aktif dalam organisasi keagamaan. Sejak akhir tahun 1950-an berdiri banyak organisasi keagamaan orang Jawa di Suriname. Pada tahun 1959, didirikan Perhimpunan Ahmadiyah Islam (PAI) yang menampung jemaah kiblat barat. Kurang lebih terdapat 70 kelompok jamaah masjid kiblat barat di Suriname yang bergabung dengan organisasi ini. PAI merubah namanya menjadi Asafia Islam (AI) pada pertengahan tahun 1970-an. Untuk menyaingi pengaruh kiblat barat, para muslim kiblat timur juga membentuk organisasi bernama *Stichting Islamitische Gemeenten in Suriname* (SIS) pada tahun 1970 dan 40 kelompok jamaah masjid kiblat timur bergabung dengan organisasi ini. Pada tahun 1974, orang-orang India Islam yang baru saja mendirikan organisasi keagamaan meminta bergabung dengan SIS. Berdasarkan kesepakatan bersama SIS juga dikenal dengan nama Madjelis Muslimin Suriname (Hendrix & van Waning, 2010; Landman, 1992).

Gambar 1. Rombongan Suku Jawa Suriname Tiba di Belanda Pada Tanggal 10 November 1975



Sumber: de Waarheid (1975)

Pada tanggal 25 November 1975, Suriname mendapatkan kemerdekaannya. Hari kemerdekaan menjadi titik penting bagi kehidupan suku Jawa di Suriname (Rahmat et al., 2018). Mayoritas orang Jawa bergabung sebagai warga negara Suriname, sedangkan sebagian kecil lainnya memilih meninggalkan Suriname. Bagi kelompok minoritas, kemerdekaan Suriname hanya akan menjadi bencana terutama dominasi suku Kreol dalam pemerintahan dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antar etnis. Karena itu mereka kemudian meninggalkan Suriname

menuju negara-negara Eropa salah satunya Belanda (Meel, 2011). Walaupun orang-orang Jawa di Suriname telah meninggalkan upaya mereka untuk kembali ke Indonesia, mereka tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan Indonesia terutama dengan cara menghubungi kerabat yang ada di Indonesia, dan mempertahankan budaya Jawa dengan baik.

KESIMPULAN

Suku Jawa masuk ke tanah Suriname mulai tahun 1890 hingga 1939. Umumnya orang-orang Jawa bekerja sebagai pekerja kontrak di perkebunan (tebu, karet, dsb), penambangan (bauksit), atau pekerja pabrik selama lima tahun. Para pekerja Jawa bermula sebagai pekerja kontrak dengan kondisi hidup yang mengesankan dan jauh dari kata layak baik dalam berbagai hal. Setelah sistem *poenalie sanctie* dihapuskan, mulai tahun 1930-an para pekerja Jawa mulai mendapatkan kebebasan dan kehidupan yang lebih baik. Pekerjaan yang ditekuni juga semakin beragam mulai petani, peternak, hingga seniman. Dari segi keagamaan suku Jawa di Suriname terbagi menjadi dua kelompok yakni *madep ngulon* (kiblat barat) dan *madep ngetan* (kiblat timur). Pada masa revolusi nasional Indonesia, muncul gerakan orang-orang Jawa Suriname untuk pulang ke Indonesia. Sebagian kecil dari orang Jawa Suriname pulang ke Indonesia dengan gerakan *mulih njowo* pada tahun 1954. Setelah Suriname berubah menjadi wilayah otonom pada tahun 1954, orang-orang Jawa berubah dari suku yang diremehkan hingga menjadi yang berpengaruh di Suriname baik segi sosial, ekonomi, hingga politik. Setelah kemerdekaan Suriname pada tahun 1975, sebagian besar bertahan di negaranya, dan sebagian kecil pergi ke Belanda untuk menghindari konflik antar etnis. Saran untuk penelitian selanjutnya ialah meneliti kehidupan suku Jawa Suriname dari sudut pandang lainnya misalnya sejarah lingkungan atau biografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, R. B. (2001). In Place of Slavery: A Social History of British Indian and Javanese Laborers in Suriname. *The Historian*, 63(2), 390.
- de Belder, J., Bos, R., Teitler, G., Wels, C. B., Fasseur, C., Meynen, A., Emery, C. R., Kossmann, J. A., & Fasseur, C. (1982). *A cheque drawn on a failing bank: the address delivered by Queen Wilhelmina on 6th/7th December 1942*. Springer.
- de Kom, A. (2022). *We slaves of Suriname*. John Wiley & Sons.
- de Waarheid. (1975). *Jaren in de Schuld voor een enkele reis naar Nederlandse kazerne*.
- Domingo, V. (1995). Surinamese Migration and Development. *Bridgewater Review*, 14(1), 7–10.
- Ehrenburg, H., & Meyer, M. (2015). *Bouwen aan de wilde kust Geschiedenis van de civiele infrastructuur van Suriname tot 1945*. LM Publishers.
- Emmer, P. C. (1990). Immigration into the Caribbean; The introduction of Chinese and East Indian indentured labourers between 1839 and 1917. *Itinerario*, 14(1), 61–95.
- Gobardhan-Rambocus, L., & Hassankhan, M. S. (1993). Immigratie en Ontwikkeling: emancipatie van contractanten. *Paramaribo: Anton de Kom Universiteit*.
- Grantham, H. S., Duncan, A., Evans, T. D., Jones, K. R., Beyer, H. L., Schuster, R., Walston, J., Ray, J. C., Robinson, J. G., & Callow, M. (2020). Anthropogenic modification of forests means only 40% of remaining forests have high ecosystem integrity. *Nature Communications*, 11(1), 5978.
- Hendrix, E. M., & van Waning, M. A. (2010). *De Javaanse moslims in Suriname: een kwalitatief onderzoek anno 2009*.
- Hoefte, R. (1990). *De betovering verbroken: de migratie van Javanen naar Suriname en het rapport-Van Vleuten (1909)* (Vol. 12). Foris Publications.
- Hoefte, R., & Meel, P. (2022). *Twentieth-century Suriname: Continuities and discontinuities in a new world society*. Brill.
- Ismael, J. (1949). *De immigratie van Indonesiërs in Suriname*. Luctor et Emergo.
- Knol, Y. (2012). *De geschiedenis van Suriname*. Nieuw Amsterdam.
- Landman, N. (1992). *Van mat tot minaret: de institutionalisering van de islam in Nederland*. VU uitgeverij.
- Meel, P. (2011). Continuity through diversity: the Surinamese Javanese diaspora and the

- homeland anchorage. *Wadabagei*, 13(3), 95–134.
- Rahmat, A., Supriatna, N., & Kamsori, M. E. (2018). Dari Imigrasi Menuju Integrasi: Peranan Etnis Jawa dalam Politik di Suriname (1991-2015). *FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 7(1).
- Schinagl, D. (2009). *De ontwikkelingen van de Javaans-Surinaamse moslimgemeenschap in Nederland*. University of Utrecht.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Ombak.
- Stedman, J. G. (1962). *The Journal of John Gabriel Stedman, 1744-1797: Soldier and Author, Including an Authentic Account of His Expedition to Surinam, in 1772*. Mitre Press.
- Susanti, S. (2016). Nasionalisme Dan Gerakan Mulih Njowo, 1947 Dan 1954. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 1(2), 107–120.
- Towikromo, Y. (1997). *De islam van de Javanen uit Suriname in Nederland: een exploratief onderzoek naar de religieuze organisatievorming van de Surinaamse-Javanen in Nederland*. Amrit.
- van Galen, C. W., & Hassankhan, M. S. (2018). A research-note on the slave registers of Suriname, 1830–1865. *The History of the Family*, 23(3), 503–520.